

Apakah infrastruktur sosial, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran memengaruhi kemiskinan? perspektif maqashid syariah di Indonesia

Muhamad Andrian Setyo Nugroho*, Saifudin Zuhri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: andrianmuhamad89@gmail.com)

Abstract

Poverty remains a structural problem in Indonesia despite various development policies that have been implemented, particularly in the education, health, and employment sectors. The inconsistency of empirical findings and the dominance of conventional economic approaches underscore the need for a more comprehensive, value-based analytical framework. This study aims to analyze the influence of social infrastructure, the Human Development Index (HDI), and unemployment on poverty levels from the perspective of maqashid syariah. The method used in this study is panel data regression based on data from the Indonesian Central Statistics Agency (BPS). The results show that education has a positive and significant effect on poverty, indicating that ineffective, productivity-oriented educational development can increase poverty. Meanwhile, health has a positive but insignificant effect on poverty. Furthermore, HDI and unemployment have a negative and significant effect on poverty, indicating that integrated human development is effective in reducing poverty, and indicating that poverty is not solely determined by formal employment status. From the perspective of maqashid syariah, these findings confirm that poverty alleviation requires achieving overall *maslahah* by protecting reason, the soul, and property.

Keywords: Poverty, Social Infrastructure, Human Development Index, Unemployment.

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi permasalahan struktural di Indonesia meskipun berbagai kebijakan pembangunan telah dilakukan, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Ketidakkonsistenan temuan empiris serta dominasi pendekatan ekonomi konvensional menunjukkan perlunya kerangka analisis yang lebih komprehensif dan berbasis nilai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh infrastruktur sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan dalam perspektif maqashid syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa pembangunan pendidikan yang belum efektif dan berorientasi produktivitas justru berpotensi memperbesar kemiskinan. Sementara itu, kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya, IPM dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang terintegrasi efektif dalam menekan kemiskinan, dan mengindikasikan kemiskinan tidak semata-mata ditentukan oleh status pekerjaan formal. Dalam perspektif maqashid syariah, temuan ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menuntut pencapaian kemaslahatan secara menyeluruh melalui perlindungan akal, jiwa, dan harta.

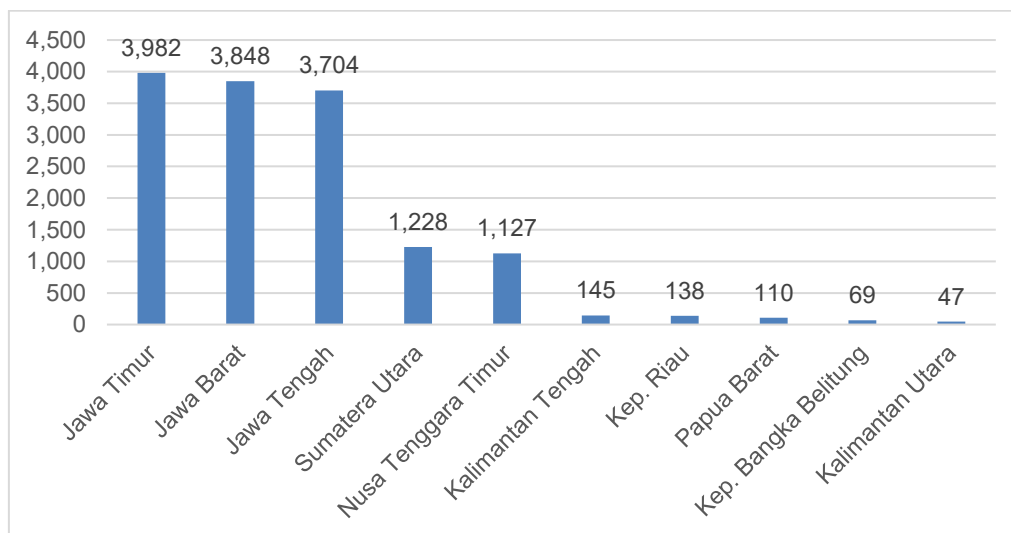
Kata kunci: Kemiskinan, Infrastruktur Sosial, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran.

How to cite: Nugroho, M. A. S., & Zuhri, S. (2025). Apakah infrastruktur sosial, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran memengaruhi kemiskinan? perspektif maqashid syariah di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(3), 871–885. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i3.1672>



1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara dan sering dijadikan indikator untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara (Munandar et al., 2020). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini umumnya dipicu oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya penting, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja (Handayani & Woyanti, 2021). Fenomena kemiskinan tidak hanya dialami oleh negara berkembang, tetapi juga masih menjadi tantangan di negara maju, termasuk Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup kompleks. Permasalahan ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan dan berpotensi meningkat seiring dengan dinamika perekonomian nasional (Alvia et al., 2023).



Sumber: BPS Indonesia

Gambar 1. Jumlah Kemiskinan di Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di berbagai provinsi di Indonesia pada tahun 2024 masih tergolong tinggi. Lima provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Jawa Timur (3,9 juta jiwa), Jawa Barat (3,8 juta jiwa), dan Jawa Tengah (3,7 juta jiwa), diikuti Sulawesi Utara (1,2 juta jiwa) dan Nusa Tenggara Timur (1,1 juta jiwa). Sementara itu, lima provinsi dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah Kalimantan Tengah (145 ribu jiwa), Kepulauan Riau (138 ribu jiwa), Papua Barat (110 ribu jiwa), Kepulauan Bangka Belitung (69 ribu jiwa), dan Kalimantan Utara (47 ribu jiwa). Kondisi ini menjadi ancaman jangka panjang yang memerlukan perhatian serius dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah keterbatasan infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial mencakup berbagai fasilitas dan layanan yang berperan dalam mendukung pengembangan manusia dan peningkatan

kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, layanan publik, serta program sosial (Auldri et al., 2024). Ketidakterpenuhan infrastruktur tersebut dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian. Di antara komponen infrastruktur sosial, pendidikan menjadi faktor krusial dalam menentukan tingkat kemiskinan.

Rendahnya tingkat pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. Pendidikan yang terbatas menghambat individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan memadai, sehingga memperbesar risiko kemiskinan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu, yang pada akhirnya dapat mendorong mobilitas sosial dan ekonomi (Rindiani et al., 2022). Selain pendidikan, aspek kesehatan juga memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan.

Kesehatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Kondisi kesehatan yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendorong produktivitas masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan cenderung menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, sehingga rentan terhadap penyakit dan menurunnya kemampuan produktif. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi rumah tangga (Prameswari & Hermawan, 2023).

Selain pendidikan dan kesehatan, tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang rendah mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang belum berkembang secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. IPM digunakan sebagai indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM diharapkan dapat mendorong pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial (Sukron & Yasin, 2021).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingkat pengangguran. Tingginya angka pengangguran dapat menghambat pembangunan ekonomi dan memperburuk kondisi kemiskinan karena individu tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai. Pengangguran umumnya disebabkan oleh keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya keterampilan, serta tingkat pendidikan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kondisi ini menjadikan pengangguran sebagai salah satu permasalahan ekonomi yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat (Yoga et al., 2022).

Upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, IPM, serta penurunan tingkat pengangguran sejalan dengan perspektif maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan hidup manusia. Lima tujuan utama maqashid syariah meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia melalui akses pendidikan, kesehatan, dan

kesejahteraan ekonomi merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan tersebut (Safitri et al., 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Pradana & Pasaribu (2023) menemukan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan S. N. Aini & Nugroho (2023) menunjukkan pengaruh negatif. Kemudian penelitian Tjiabrata et al (2021) Menyatakan bahwa kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan penelitian Isrowiyah (2021) Mengemukakan bahwa kesehatan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sementara itu penelitian Ristika et al (2021) Menjabarkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan temuan Rifa & Agus (2023) Menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Selanjutnya menurut penelitian Irawati & Pakereng (2023) Menjelaskan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan menurut penelitian Azizah & Asiyah (2022) Menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait peran infrastruktur sosial dalam perspektif maqashid syariah yang masih relatif terbatas dalam kajian empiris.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat menjadi dasar perumusan kebijakan publik yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur ekonomi Islam, sekaligus kontribusi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan nilai-nilai maqashid syariah.

2. Tinjauan Pustaka

Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana seseorang tidak mempunyai sumber daya untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Secara umum, permasalahan utama kemiskinan sering diartikan sebagai ketidakmampuan individu dalam membeli kebutuhan dasar seperti sandang, papan, dan pangan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang memiliki banyak aspek dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu perspektif saja. Kemiskinan bukanlah isu yang bersahabat, kemiskinan merupakan permasalahan yang melekat dalam kehidupan masyarakat (Isrowiyah, 2021).

Kemiskinan ini, kondisi seseorang yang tidak memiliki jumlah uang atau harta benda yang normal atau tidak dapat diterima secara sosial. Kemiskinan dikatakan ketika ada orang yang tidak memiliki sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, mengidentifikasi orang miskin membutuhkan apa yang paling dibutuhkan dalam hidupnya. Misalnya, berkaitan dengan kesehatan yang buruk, pendidikan yang buruk, ketidakmampuan bekerja, perilaku yang tidak baik kepada orang lain (Saragih et al., 2022).

Tjiabrata et al (2021) Menjelaskan kemiskinan dibagi menjadi empat bentuk, yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut adalah seseorang yang dianggap termasuk dalam kelompok kemiskinan absolut jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.
- 2) Kemiskinan relatif merupakan seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, akan tetapi masih di bawah dari keadaan lingkungan di sekitarnya.
- 3) Kemiskinan budaya dijelaskan seseorang termasuk dalam kelompok miskin budaya apabila sikap atau kelompok tersebut tidak berusaha meningkatkan taraf hidupnya meskipun mendapatkan dukungan dari pihak lain, karena mempunyai sikap malas dan tidak ingin memperbaiki keadaan.
- 4) Kemiskinan struktural artinya seseorang mengalami keadaan buruk yang disebabkan kekurangan akses sumber daya, sehingga mengakibatkan sistem sosial politik dan budaya yang tidak mendukung pembebasan dari kemiskinan, namun yang menyebabkan terjadinya perluasan kemiskinan.

Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, dan sebagian besar masyarakat mengalami penurunan standar hidup ketika mereka kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, bukanlah hal yang baru jika pengangguran menjadi topik perdebatan politik oleh para politisi yang berupaya menerapkan solusi penciptaan lapangan kerja. Secara umum, pengangguran mengacu pada seseorang yang secara aktif mencari pekerjaan di dunia pekerjaan dan memiliki pekerjaan yang diinginkan, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan sesuai rencana. Alasan umum terjadinya pengangguran adalah bahwa penganggur yang menghadapi pengangguran mungkin tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang dipilih (Romadhona et al., 2024).

Pendidikan

Pendidikan adalah pondasi utama dari kemajuan ekonomi negara. Bakat terlatih membantu menghasilkan produktivitas tinggi dan inovasi kompetitif di pasar global. Pentingnya pendidikan tidak hanya untuk tingkat nasional tetapi untuk pembangunan regional atau lokal. Proses kemajuan individu terkait erat dengan pengetahuan umum dan luas, termasuk keterampilan untuk pengalaman profesional, dan tingkat pendidikan adalah fokus utama dari setiap masalah yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Pradana & Pasaribu, 2023).

Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai tidak hanya meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan motivasi bagi siswa, tetapi juga memastikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh siswa. Infrastruktur pendidikan meliputi berbagai aspek, meliputi bangunan sekolah, perpustakaan, sarana olahraga, kurikulum dan sistem pembelajaran. Selain itu, distribusi infrastruktur, khususnya lokasi terpencil, penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, sehingga semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran yang sama. Investasi dalam infrastruktur pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara (Dhia et al., 2024).

Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Menurut *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, dan bukan sekedar bebas dari penyakit atau kelemahan. Ketika tingkat kesehatan rendah karena berbagai alasan tertentu, termasuk penyakit, sarana, dan prasarana yang tidak memadai, dampak utamanya adalah berkurangnya pendapatan masyarakat karena biaya pengobatan dan hilangnya gaji karena ketidakhadiran ketika bekerja. Dalam hal ini, kegiatan yang tergolong buruk, menyebabkan masyarakat terjerumus ke dalam lingkaran kemiskinan (WHO & OECD, 2007).

Infrastruktur kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur kesehatan meliputi berbagai jenis, mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga apotek. Infrastruktur pendidikan harus mudah diakses oleh masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau di daerah yang sulit diperhatikan, tetapi mereka dapat mudah diakses dengan memastikan transportasi umum yang memadai. Kualitas fasilitas medis harus terjangkau oleh masyarakat, terutama orang miskin. Agar tidak terlalu membebani masyarakat untuk biaya pengobatan (Tambaip et al., 2023).

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur hasil pembangunan manusia berdasarkan banyak komponen fundamental kualitas hidup. IPM sebagai kualitas hidup didasarkan pada pendekatan yang terdiri dari tiga dimensi dasar. Mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan yang luas, dan kehidupan yang layak. Dimensi ini mempunyai arti yang sangat luas karena berkaitan dengan banyak faktor. Angka harapan hidup saat lahir digunakan untuk mengukur status kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur keberhasilan pembangunan sosial ekonomi, keberhasilan kesehatan, dan pendapatan yang cukup yang disesuaikan suatu wilayah atau negara. (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018).

Maqashid Syariah

Maqashid syariah dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan makna-makna yang dijadikan tujuan yang hendak diwujudkan berdasarkan ketetapan-ketetapan Allah Swt. Hamdani (2020) Menjelaskan unsur maqashid syariah dikategorikan sejumlah lima unsur yaitu:

- 1) Menjaga Agama (*Hifdz Al-Din*). Melindungi Agama sebagai bentuk penghormatan islam terhadap agama. Allah Swt memerintahkan hambanya untuk berdoa. Bentuk-bentuk ibadahnya antara lain: salat, puasa, zakat, haji, zikir, dan sebagainya. Negara harus memberikan keamanan kepada masyarakat yang mengurus urusan demi kesejahteraan bangsanya. Agama menjadi pedoman hidup semua manusia yang meyakini keberadaan tuhan di dunia ini, agar manusia dapat hidup bahagia dan tidak merasa cemas dalam menjalankan agamanya.
- 2) Menjaga Jiwa (*Hifdz Al-Nafs*). Melindungi jiwa, islam melindungi seluruh ummat. Untuk menjaga keselamatan jiwa manusia, kesehatan umat manusia, serta menjauhkan dari pembunuhan tanpa alasan yang nyata, Allah Swt melarang

membunuh seseorang tanpa alasan yang nyata. Islam melarang menghilangkan nyawa orang lain, tapi juga mengharamkan bunuh diri. Hidup berdampingan secara damai, menghindari konflik sosial, dan hidup bahagia adalah salah satu tujuan dari negara yang sejahtera.

- 3) Menjaga Akal (*Hifdz Al-Aql*). Melindungi akal sebagai alasan mengapa harus menuntut ilmu sepanjang hayat. Akal menjadikan manusia lebih mulia dibandingkan makhluk tuhan lainnya. Untuk mensyukuri nikmat Allah Swt, Syariat islam mewajibkan seseorang untuk melindungi dirinya dari segala sesuatu yang dapat menghalangi kecerdasannya. Perlindungan dan kemajuan sangat penting bagi negara kesejahteraan. Hal ini menunjukkan komitmen dan visi yang kuat untuk meningkatkan kemampuan seluruh masyarakat, baik dalam pendidikan, karir, dan keterampilan.
- 4) Menjaga Keturunan (*Hifdz Al-Nasab*). Melindungi keturunan diperlukan untuk meningkatkan kualitas keturunan dan memperkuat semangat generasi penerus, membina persahabatan antar manusia, demi kepentingan generasi mendatang. Negara melindungi kehidupan warganya, termasuk anak dan bayi baru lahir, anak jalanan, anak kurang gizi, perlindungan perempuan hamil, dilarangnya zina dan perkawinan sedarah.
- 5) Menjaga Harta (*Hifdz Al-Mal*). Melindungi harta untuk menjaga kehalalan harta benda, negara harus ada untuk melindungi tata kelola ekonomi masyarakat dan memberikan keamanan. Perlindungan ekonomi sangat komprehensif dan mencakup perlindungan terhadap seluruh warga negaranya yang ingin berinvestasi, berusaha, melakukan kegiatan kewirausahaan untuk menjalankan perekonomian, termasuk swasta yang berinvestasi pada negara. Hukum islam mengenal berbagai bentuk muamalah, antara lain: jual beli, sewa guna usaha, dan gadai. Untuk mengatasi hal tersebut, islam melarang warga negaranya mengkonsumsi harta manusia dengan cara yang salah seperti pencurian, riba, penipuan, penurunan berat timbangan, dan korupsi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Martono (2011) Menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif didefinisikan penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka dan memproses serta menganalisis data tersebut untuk mengestrak informasi dari angka-angka yang dikumpulkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah siap untuk diolah, yang bersumber dari publikasi oleh lembaga atau instansi terkait dan langsung bisa digunakan oleh peneliti (Zahriyah et al., 2021).

Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan data dari dua karakteristik data, yaitu *time series* dan *cross section*. Disebut data panel karena memiliki kriteria: terdiri dari banyak objek penelitian, serta terdiri dari banyak waktu penelitian (Winarno, 2017). Secara rinci yang dijadikan variabel independen yaitu pendidikan, kesehatan, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran. Sementara variabel dependen yaitu kemiskinan. Pendekatan maqashid syariah yang

digunakan dalam penelitian ini digunakan sebagai perspektif normatif berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan bukan menjadi variabel tersendiri dalam model persamaan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari masing-masing lembaga dalam laporan statistik, data kemiskinan, pendidikan, kesehatan, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran yang di ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) yang diunduh melalui laman BPS Indonesia periode 2022-2024. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Metode observasi merupakan telaah pustaka dengan mengamati literatur dari jurnal-jurnal terdahulu. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menganalisis data dengan data-data laporan yang diperoleh dari lembaga nasional (Thahir et al., 2021).

Analisis Penelitian ini menggunakan Regresi Panel Data. Tahapan dalam uji panel data adalah pertama memilih model Panel Data yang sesuai dengan kriteria, kemudian baru melakukan uji analisis asumsi klasik untuk menentukan model sudah memenuhi syarat atau belum, setelah hasil uji memenuhi syarat baru dilakukan interpretasi hasil (Bawono & Shina, 2018; Sihombing, 2022). Kemudian untuk model persamaan penelitian ini menggunakan logaritma natural dari beberapa variabel untuk menstandarkan satuan.

$$Pov_{it} = \alpha + \beta_1 LnEdu_{it} + \beta_2 LnHealth_{it} + \beta_3 HDI_{it} + \beta_4 TPT_{it} + e_{it}$$

Dimana:

- POV : Kemiskinan
 Edu : Pendidikan
 Health : Kesehatan
 HDI : Indeks Pembangunan Manusia
 TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
 e : Error
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n$: Parameter Koefisien
 i : Provinsi
 t : Waktu (tahunan)

5. Hasil dan Pembahasan

5.1. Hasil penelitian

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinieritas

	LN_Pendidikan	LN_Kesehatan	IPM	TPT
LN_Pendidikan	1.000000	0.919947	-0.00232	0.202764
LN_Kesehatan	0.919947	1.000000	0.054267	0.262493
IPM	-0.002328	0.054267	1.000000	0.376156
TPT	0.202764	0.262493	0.376156	1.000000

Hasil uji multikolinearitas di atas menggunakan uji koefisien korelasi. Hasilnya tidak ada hubungan silang yang bernilai lebih dari 1 (Bawono & Shina, 2018). Jadi dapat dipastikan model regresi ini tidak ada masalah multikolinearitas.

Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedasitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.694599	19.525772	0.189217	0.8505
LN_Pendidikan	-1.669374	1.598722	-1.044193	0.3003
LN_Kesehatan	0.793196	0.653473	1.213816	0.2293
IPM	0.020205	0.122159	0.165397	0.8692
TPT	0.002927	0.202273	0.014472	0.9885

Pada hasil uji heteroskedasitas di atas, nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat dijelaskan tidak terjadi masalah uji heteroskedasitas.

Hasil Pemilihan Model dan Estimasi Regresi Data Panel

Tabel 4 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	584.616808	(33,64)	0.0000
Cross-section Chi-square	582.613083	33	0.0000

Jika nilai probabilitas *cross-section chi-square* memiliki nilai $> 0,05$ yang mana artinya model *common effect* yang harus digunakan. Sebaliknya, jika nilai *cross-section chi-square* memiliki hasil probabilitas $< 0,05$, maka model *fixed effect* yang digunakan. Berdasarkan pada Tabel 4 nilai *cross-section chi-square* memiliki nilai probabilitas 0.0000 yang mana berarti $< 0,05$ menunjukkan bahwa model regresi *fixed effect* yang dipilih.

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.483922	4	0.0059

Dapat dilihat dari tabel pengujian uji *hausman* menunjukkan nilai probabilitas *Cross-section random* yaitu 0.0059 yang menunjukkan $< 0,05$. Sehingga model regresi yang digunakan adalah model *Fixed effect*.

Tabel 6. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,385308	0,593987	0,648681	0.5189
LN_Pendidikan	1,112903	0,048634	22,88308	0.0000
LN_Kesehatan	0,021233	0,019879	1,068101	0.2895
IPM	-0,053266	0,003716	-14,33355	0.0000
TPT	-0,018023	0,006153	-2,929081	0.0047
R-squared	0,999599			
Adjusted R-squared	0,999367			
F-statistic	4310,465			
Prob(F-statistic)	0,000000			

Hasil dari pengujian regresi penelitian ini menjelaskan bahwa variabel (Y) Kemiskinan dengan variabel (X) Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran. Memperoleh *Adjusted R-squared* 0.999367, artinya

adanya kemampuan dalam menjelaskan pengaruh variabel dependen 99 persen. 1 persen dijelaskan oleh variasi lain diluar penelitian.

Nilai uji F dapat dilihat dari prob (*F-statistic*). Jika nilai probabilitas pada (*F-statistic*) $< 0,05$ maka dapat dikatakan secara simultan variabel independen berhubungan dengan variabel dependen. Dan pengujian pada tabel 4.8, nilai P Value pada prob (*F-statistic*) sebesar $0.000000 < 0,05$ maka dapat dijelaskan bahwa variabel independen (X) secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Berikut merupakan hasil dari uji regresi *fixed effect model* pada Tabel 6.

- a. Variabel X1 (Pendidikan) dinyatakan koefisiensi sebesar 0.778316 dan nilai probabilitasnya $0.0000 < 0,05$. Maka pendidikan dinyatakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
- b. Variabel X2 (Kesehatan) dinyatakan koefisiensi sebesar 1.112903 dan nilai probabilitasnya $0.2895 > 0,05$. Maka kesehatan dinyatakan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.
- c. Variabel X3 (Indeks Pembangunan Manusia) dinyatakan koefisiensi sebesar -0.053266 dan nilai probabilitasnya $0.0000 < 0,05$. Maka indeks pembangunan manusia dinyatakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
- d. Variabel X4 (Pengangguran) dinyatakan koefisiensi sebesar -0.018023 dan nilai probabilitasnya $0.0047 < 0,05$. Maka pengangguran dinyatakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

5.2. Pembahasan

Pendidikan dan Kemiskinan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan dan pengaruhnya teridentifikasi bermakna dalam model. Temuan ini dapat dibaca sebagai sinyal bahwa peningkatan indikator pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas dan pemerataan manfaat pendidikan bagi kelompok miskin. Dengan kata lain, ketika pendidikan diproksi melalui pembangunan atau ketersediaan infrastruktur, dampaknya terhadap kemiskinan sangat bergantung pada efisiensi, kualitas layanan, serta distribusi akses yang adil.

Dalam konteks Indonesia, infrastruktur pendidikan yang tidak efisien dapat menurunkan kualitas pembelajaran dan menciptakan akses yang timpang, sehingga kelompok miskin tetap tertinggal meskipun terjadi penambahan fasilitas. Perbaikan yang diperlukan termasuk peningkatan distribusi fasilitas, penggunaan Teknologi, penganggaran dan manajemen guru. Kebijakan dan intervensi yang tidak tepat sasaran di sektor pendidikan dapat menghambat masyarakat miskin mengakses pendidikan. Tanpa dukungan untuk akses pendidikan, kemungkinan besar akan gagal dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan yang tidak memperhitungkan keterampilan dan tidak produktif membuat sulit untuk keluar dari kemiskinan, karena kekurangan keterampilan individu, mempengaruhi produktivitas dan keahlian (Pribowo et al., 2021).

Dalam perspektif maqashid syariah, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai penyediaan fasilitas fisik, tetapi sebagai instrumen *hifz al-'aql* (perlindungan dan pengembangan akal) yang bertujuan meningkatkan kapasitas rasional, keterampilan produktif, dan kemandirian ekonomi individu. Ketika pendidikan gagal menghasilkan kompetensi yang relevan dengan pasar kerja dan aktivitas ekonomi riil, maka tujuan *hifz al-'aql* tidak tercapai secara fungsional. Kondisi ini menjelaskan secara epistemologis mengapa pendidikan justru berkorelasi positif dengan kemiskinan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan yang bersifat simbolik, berorientasi pada angka partisipasi atau pembangunan fisik tanpa transformasi kualitas dan relevansi keterampilan, tidak hanya gagal mengentaskan kemiskinan, tetapi juga menciptakan *structural mismatch* antara lulusan dan kebutuhan ekonomi. Dalam kerangka maqashid syariah, kegagalan ini merupakan bentuk ketidaktercapaian kemaslahatan karena akal tidak diarahkan pada fungsi produktif yang menjaga keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) (Wahyudi & Latif, 2023).

Kesehatan dan Kemiskinan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kesehatan memiliki arah hubungan positif dengan tingkat kemiskinan, namun pengaruhnya tidak teridentifikasi bermakna dalam model. Temuan ini mengisyaratkan bahwa perbaikan aspek kesehatan atau ketersediaan fasilitas kesehatan tidak otomatis diikuti penurunan kemiskinan dalam periode dan konteks yang diteliti. Dengan kata lain, efek kesehatan terhadap kemiskinan cenderung bergantung pada faktor pendukung lain, terutama kapasitas ekonomi rumah tangga dan efektivitas perlindungan sosial.

Secara substantif, ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai, jika penduduk sangat miskin, dan pendapatannya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka orang miskin tersebut tidak mampu keluar dari kemiskinan (Purnomo et al., 2021). Akan tetapi, peningkatan akses ke fasilitas perawatan kesehatan diperlukan dengan meningkatkan pengembangan infrastruktur dan kualitas layanan kesehatan, untuk mengurangi beban biaya kepada masyarakat (Nadhi et al., 2024).

Dalam maqashid syariah, kesehatan merupakan prasyarat utama *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Namun secara epistemologis, *hifz al-nafs* tidak berhenti pada penyediaan layanan medis, melainkan menuntut terciptanya sistem sosial-ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjaga kesehatannya secara berkelanjutan. Ketika layanan kesehatan tersedia tetapi biaya pengobatan dan kehilangan pendapatan akibat sakit tetap tinggi, maka kesehatan tidak berfungsi sebagai faktor produktif yang mampu mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, ketidaksignifikanan pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan mencerminkan bahwa perlindungan jiwa dalam konteks pembangunan belum terintegrasi dengan perlindungan ekonomi. Dalam kerangka maqashid, hal ini menunjukkan adanya fragmentasi kebijakan, di mana *hifz al-nafs* tidak diiringi dengan *hifz al-mal*, sehingga kesehatan belum mampu berperan sebagai modal manusia yang produktif (Sa'adah, 2022).

Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pendidikan yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan, dan pengaruhnya teridentifikasi bermakna dalam model. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik capaian pembangunan manusia, semakin rendah kecenderungan kemiskinan.

Keberhasilan pembangunan manusia juga dapat dinilai dari kemampuan suatu wilayah dalam mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang menghambat kesejahteraan, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan layanan kesehatan, dan berbagai hambatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, kemajuan pembangunan manusia bukan hanya tercermin pada indikator sosial, tetapi juga pada efektivitas kebijakan publik dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup secara berkelanjutan (Ardian et al., 2021).

Secara epistemologis, IPM memiliki korespondensi langsung dengan maqashid syariah karena mencerminkan integrasi antara *hifz al-'aql* (pendidikan), *hifz al-nafs* (kesehatan), dan *hifz al-mal* (standar hidup layak). Ketika ketiga dimensi tersebut meningkat secara simultan, maka kemaslahatan tidak hanya bersifat material, tetapi juga struktural dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengaruh negatif IPM terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang selaras dengan maqashid syariah, yakni pembangunan manusia yang seimbang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan intervensi sektoral. IPM dalam hal ini dapat dipahami sebagai representasi empiris dari tercapainya maqashid syariah pada level kebijakan publik (Bahtiar & Hannase, 2021).

Pengangguran dan Kemiskinan

Pengujian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan, dan hubungan tersebut teridentifikasi bermakna dalam model. Temuan ini mengindikasikan bahwa dinamika pengangguran tidak selalu berjalan searah dengan kemiskinan dalam konteks yang diteliti. Namun demikian, hasil pengujian juga mengisyaratkan bahwa kemiskinan di Indonesia tidak semata ditentukan oleh tingkat pengangguran. Artinya pengangguran bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kemiskinan, yang dimana ketika seseorang yang baru menyelesaikan pendidikan dan memiliki keahlian yang sesuai, dan sedang mencari pekerjaan. Selain itu, pendapatan keluarga yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup untuk keluarga yang menganggur, atau seseorang yang tidak bekerja akan tetapi mempunyai lahan untuk disewakan, dan menjadikannya ladang bisnis (Oktaviana et al., 2021).

Dalam maqashid syariah, bekerja merupakan instrumen utama *hifz al-mal* karena pekerjaan memungkinkan individu menjaga keberlangsungan hidup dan kemandirian ekonomi. Namun, maqashid tidak memaknai kesejahteraan semata-mata dari status bekerja, melainkan dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Oleh karena itu, seseorang yang menganggur tetapi memiliki aset produktif tidak serta-merta dikategorikan miskin.

Secara epistemologis, hasil ini menunjukkan bahwa kemiskinan dalam perspektif maqashid syariah lebih ditentukan oleh kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar (*daruriyyat*), bukan sekadar ketiadaan pekerjaan formal. Dengan demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup berfokus pada penurunan pengangguran, tetapi juga pada distribusi aset, akses ekonomi, dan penguatan kemandirian masyarakat (Eliza, 2022).

Kesimpulan

Variabel Pendidikan dinyatakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempengaruhi kemiskinan. Variabel Kesehatan dinyatakan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan tidak mempengaruhi kemiskinan. Variabel Indeks Pembangunan Manusia dinyatakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia mempengaruhi kemiskinan. Variabel Pengangguran dinyatakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa pengangguran mempengaruhi kemiskinan.

Referensi

- Aini, S. N., & Nugroho, R. Y. Y. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1).
- Alvia, D. O., Efendi, I. W., Malihah, K. P., & Kurniawan, M. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2014-2023. *Jurnal Media Akademik*, 2(6).
- Ardian, R., Yulmardi, Y., & Bhakti, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1, 23–34. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.3>
- Auldri, A., Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar, S. (2024). Pengaruh Infrastruktur Listrik dan Infrastruktur Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 106–117.
- Azizah, A. N., & Asiyah, B. N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2697–2718. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420>
- Bahtiar, Y., & Hannase, M. (2021). Determinan Indeks Pembangunan Manusia dengan Pendekatan Maqashid Syariah Al-Ghazali. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 89–97.
- Bawono, A., & Shina, A. F. I. (2018). *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi dan Bisnis Islam Aplikasi Dengan EVIEWS*. LP2M IAIN Salatiga.
- Dhia, T. K., Maharani, R. D., Apriliandis, R., Siregar, C. M., Satrio, I. F., Arhandi, F., Athaullah, K. A., & Muzzaki, A. A. (2024). Infrastruktur Pendidikan Terpadu Untuk Meningkatkan Kualitas Belajar Siswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(16), 856–864.

- Eliza, G. (2022). *Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam*.
- Hamdani. (2020). Negara Sejahtera Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Welfare State In The Perspective Of Maqashid Syarih). *Al-Mabsut*, 14(1).
- Handayani, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh PDRB, Kemiskinan, Pengangguran, Dan Belanja Modal Terhadap IPM Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2011-2019. *Bussiness Economic Entrepreneursip*, 4(2), 17–26.
- Irawati, M., & Pakereng, M. A. I. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linier (Studi Kasus: Kota Salatiga). *Jurnal EMT KITA*, 7(2), 401–408. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.1013>
- Isrowiyah, N. (2021). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(2).
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*.
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZS), Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 01(01), 25–38.
- Nadhi, I. M. A., Dawu, E. A., Nono, A. L., Hudang, A. K., Rewa, K. A., & Gunawan, F. X. C. (2024). Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kecamatan Kampera. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE*, 10(2), 512–523.
- Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, Dan Pengangguran, Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun. *Syntax Idea*, 3(5), 1034. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1183>
- Pradana, Z. A., & Pasaribu, E. (2023). Pengaruh Pendidikan, PDRB, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 55–62.
- Prameswari, A. R., & Hermawan, A. (2023). Kinerja Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pertumbuhan Laba Di Perusahaan Properti Dan Real Estate. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 8(2), 201–216. <https://doi.org/10.51289/peta.v8i2.699>
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, u sulia. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–8316. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>
- Pribowo, K. A., Gunawan, D. S., & Suprpto. (2021). Pengaruh Pariwisata , Demografi , dan Human Capital Terhadap Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. *EKONOMIKAWAN*, 21(1), 96–108.
- Purnomo, S. D., Wijaya, M., & Setiawan, H. (2021). Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 18(1), 10–19.
- Rifa, A. L., & Waluyo, A. (2023). Pengaruh Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan dengan Zakat sebagai

- Variabel Moderasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020. *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 290–298. <https://doi.org/10.33319/jeko.v12i2.132>
- Rindiani, Riyanto, & Adhi, A. H. P. (2022). Pengaruh Keterbatasan Infrastruktur Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Desa Kedungwungu Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. *Seminar Nasional Keindonesian VII, November*, 1203–1210.
- Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmial Ekonomi Bisnis*, 12(November), 129–136. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254>
- Sa'adah, H. (2022). Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 152–175.
- Safitri, R., Baihaqi, J., & Supriyadi. (2020). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pembangunan Manusia Berbasis Maqashid Syariah Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. *IQTISHODUNA*, 16(1).
- Saragih, R. F., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 71–79.
- Sihombing, P. R. (2022). *Aplikasi EVIEWS Untuk Statistisi Pemula*. PT Dewangga Energi Internasional.
- Sukron, I., & Yasin, A. (2021). Pengaruh IPM, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Economics*, 1(3), 47–65.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023). Peran Fasilitas Kesehatan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 189–196.
- Thahir, M. I., Semmaila, B., & Arfah, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Takalar. *Journal Of Management Science*, 2(1).
- Tjiabrata, A., Engka, D., & Rompas, W. (2021). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 90–101.
- Wahyudi, F., & Latif, A. (2023). Pendidikan Inklusif di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *Journal Of Disability Studies And Research*, 2(2), 12–23.
- WHO, & OECD. (2007). *Poverty And Health*. In Revista Cubana de Salud Publica.
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Yoga, I. M., Putra, I. K. T. E., & Utomo, R. B. (2022). Pengaruh Upah Minimum dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Sutasoma*, 01(01), 2–12.
- Zahriyah, A., Suprianik, & A ParnomoMustofa. (2021). *Ekonometrika teknik dan Aplikasi dengan SPSS*. Mandala Press.